

## ABSTRAK

### PERANAN KEPOLISIAN MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DALAM PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN

**Andi Muhammad Arif Pulungan \***  
**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag \*\***  
**Dr. Cut Nurita, SH.,M.H \*\***

Pungutan liar (pungli) merupakan tindak pidana yang diatur dalam berbagai ketentuan hukum, terutama terkait dengan korupsi dan pemerasan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum penerbitan Surat Izin Mengemudi di wilayah hukum Polrestabes Medan, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi di wilayah hukum Polrestabes Medan, bagaimana hambatan dan upaya kepolisian menanggulangi pungutan liar dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara serta analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Pungli dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, terutama jika dilakukan oleh aparat negara atau pegawai negeri yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu. Pungli dapat dilakukan oleh siapa saja, namun seringkali dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, petugas pelayanan publik, atau oknum yang memanfaatkan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi di wilayah hukum Polrestabes Medan melibatkan berbagai upaya, mulai dari pencegahan hingga penindakan. Upaya preventif seperti penyertaan ikrar anti pungli, pengawasan ketat, dan pembinaan kode etik sangat penting. Selain itu, penindakan yang tegas terhadap pelaku pungli, termasuk anggota polisi, juga diperlukan. Masyarakat juga dapat berperan dalam melaporkan pungli melalui aplikasi. Hambatan penanggulangan tindak pidana pungutan liar dalam pelayanan penerbitan SIM di wilayah hukum Polrestabes Medan adalah kurangnya kesadaran masyarakat, pembuktian yang sulit, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pungli. Upaya penanggulangannya meliputi pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi, penguatan peran Satgas Saber Pungli, dan penegakan hukum yang tegas..

**Kata Kunci: Peranan, Pungutan Liar, Surat Izin Mengemudi**

\*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\*Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE POLICE IN ERADICATION OF EXTORTIONS IN ISSUING DRIVING LICENSE IN THE JURISDICTION OF THE MEDAN CITY POLICE**

**Andi Muhammad Arif Pulungan \***  
**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag \*\***  
**Dr. Cut Nurita, SH.,M.H \*\***

*Extortion (pungli) is a criminal offense regulated by various legal provisions, particularly those related to corruption and extortion. The problem in this thesis is how the legal regulations govern the issuance of driver's licenses within the jurisdiction of the Medan Police Headquarters, how the law is enforced against perpetrators of extortion in the issuance of driver's licenses within the jurisdiction of the Medan Police Headquarters, and what obstacles and police efforts are encountered in addressing extortion in the issuance of driver's licenses within the jurisdiction of the Medan Police Headquarters.*

*This research is normative and supported by empirical legal data, including interviews. The data analysis used is qualitative.*

*Extortion can be categorized as a criminal act of corruption, especially when committed by state officials or civil servants who exploit their power to coerce others into giving something. Extortion can be committed by anyone, but is often carried out by law enforcement officers, public service officers, or individuals who exploit their positions for personal gain.*

*The research findings indicate that law enforcement against perpetrators of extortion in the issuance of driver's licenses within the jurisdiction of the Medan Police Headquarters involves various efforts, from prevention to prosecution. Preventive measures such as the inclusion of an anti-extortion pledge, strict supervision, and the development of a code of ethics are crucial. Furthermore, firm action against extortion perpetrators, including police officers, is also necessary. The public can also play a role in reporting extortion through an app. Obstacles to combating illegal levies in driver's license (SIM) issuance services within the Medan Police jurisdiction include a lack of public awareness, difficult evidence, and a lack of public participation in reporting extortion. Mitigation efforts include prevention through education and outreach, strengthening the role of the Saber Pungli Task Force, and strict law enforcement.*

**Keywords: Role, Illegal Levies, Driver's License**

*\*Student of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

*\*\*Supervisor I of Law Program, Islamic University of North Sumatra*

*\*\*Supervisor II of Law Program, Islamic University of North Sumatra*